

ALFIAN RAMADHAN ARISANDI_18430066_AKUNTAN SI_S1

by Alfian Ramadhan Arisandi

Submission date: 30-Aug-2022 09:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 1889177254

File name: ALFIAN_RAMADHAN_ARISANDI_18430066_AKUNTANSI_S1.docx (531.22K)

Word count: 12980

Character count: 84828

19
**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PERUSAHAAN PADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG GO PUBLIC**

21
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi**



Diajukan Oleh :

Alfian Ramadhan Arisandi
NPM : 18430066

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2022

ABSTRAK

Riset ini bermanfaat guna menganalisis faktor yang memengaruhi performa perusahaan di perusahaan tambang yang *go public*. Populasi yang dipakai di riset ini ialah perusahaan sector tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Total sampel di riset ni banyaknya 23 perusahaan. Variabel yang dipakai di riset ini adalah *Political Connection*, *Political Cost*, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). Sumber data didapatkan dari laporan keuangan perusahaan yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data memakai metode analisis regresi linier berganda. Hasil riset ini menampakkan bahwa *Political Connection* dan Kepemilikan Institusional punya pengaruh pada Kinerja Perusahaan yang diukur dengan *Return on Assets* sedangkan *Political Cost* dan Kepemilikan Manajerial tidak punya pengaruh pada Kinerja Perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Return on Assets*.

81

Kata kunci: *Political Connection*, *Political Cost*, Kepemilikan Institusional, kepemilikan Manajerial, dan Kinerja Perusahaan

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the company's performance in mining companies that go public. The population used in this study are mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020. The number of samples in this study were 23 companies. The variables used in this research are Political Connection, Political Cost, Institutional Ownership, Managerial Ownership and Company performance as measured by using Return on Assets (ROA). The data source is obtained from the company's financial statements sourced from the Indonesia Stock Exchange. Methods of data analysis using multiple linear regression analysis method. The results of this study indicate that Political Connection and Institutional Ownership have an influence on Company Performance as measured by Return on Assets while Political Cost and Managerial Ownership have no effect on Company Performance as measured by Return on Assets.

Keywords: *Political Connection, Political Cost, Institutional Ownership, Managerial Ownership, and Company Performance*

57
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar modal ialah suatu perantara di negeri sebab pasar modal dapat memenuhi keperluan pada penawaran dan permintaan modal guna lintas industri dan perusahaan. Dan pula, pasar modal pula dipakai oleh pemerintah selaku salah satu media untuk mengontrol ekonomi suatu negara. Evolusi pasar modal dan juga semakin banyaknya sumber pendanaan public non bank, pasar modal pula ialah sumber pendanaan potensial guna perusahaan yang memerlukan pendanaan jangka pendek, menengah dan panjang.

Serta tingginya pertumbuhan industri yang deras, jadi keperluan akan informasi yang sama dengan pemungutan ketetapan investasi di pasar modal pula terus meninggi. Sebuah informasi yang berlimpah dipakai ialah informasi akuntansi, terpenting asalnya dari laporan keuangan. Eksistensi pasar modal di Indonesia sudah jadi masalah yang tinggi guna perusahaan. Hal ini diakibatkan semakin meningginya pengetahuan masyarakat guna ber investasi, terutama di perusahaan-perusahaan pada sektor tambang. Bagi (Faccio 2006 dalam Suhartono dan Sany 2015) mengemukakan kalau “perusahaan yang memiliki *Political Connection* akan mempunyai pangsa pasar yang besar”. Di riset (Faccio 2006) sudah menampakkan kalau ada 47 negara yang terhubung secara politik menikmati banyak keuntungan dibandingkan perusahaan yang tidak terhubung secara politik, seperti manfaat yang begitu tinggi, pajak yang begitu minim, kekuatan pasar yang sangat besar, dan pangsa pasar yang sangat besar.

Ini menegaskan kalau perusahaan yang terhubung lewat politik lebih kuat dibanding perusahaan yang tidak memiliki ikatan politik. Di konteks wilayah politik yang korupsi, terlihat ada peninggian perusahaan yang terpaut dengan cara politik guna memakai keperluan atau sumberdaya untuk publik jadi sumberdaya perusahaan. Hal itu dilangsungkan cuma sekedar guna bisa menang dalam persaingan di bisnis (Ang, 1997).

Dunia bisnis dan politik tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Dengan adanya koneksi politik, lebih mudah bagi perusahaan dengan ikatan politik untuk menerima proyek dan mengakses kebijakan pemerintah, sehingga perusahaan bisa mendapat peluang bisnis yang sangat tinggi. (Boubakri dkk, 2008). Dan ada koneksi politik, jadi diharapkan kedua belah pihak bisa mendapat keuntungan yang serupa (Tehupiring & Rossa, 2016). *Political Connection* membuat menyederhanakan syarat dan ketentuan bermacam perusahaan yang terpaut dengan Koneksi Politik. “Perusahaan akan lebih mudah jika salah satu anggota politisi di perusahaan mereka menjadi politisi di pemerintahan yang pula akhirnya akan mempengaruhi kebijakan perusahaan dan mengakibatkan perubahan insentif di perusahaan untuk melakukan investasi dalam hal peningkatan produktivitas” (Suhartono & Sany, 2015).

“Perusahaan yang terhubung secara politik ditemukan menikmati beberapa keuntungan diantaranya yaitu akses mudah untuk pembiayaan pinjaman bank, keringanan pajak, kekuatan pasar, dan menerima kontrak pemerintah” (Wijayanti, 2006). Bagi (Goldman et al 2009) “perusahaan yang terkoneksi politik bahkan mendapatkan keuntungan dalam hal pengurangan biaya kompetisi, mengurangi

kewajiban peraturan atau lebih mudah dalam mendapatkan kontrak yang berhubungan dengan proyek pemerintah”. Contohnya ibarat perusahaan yang memiliki hubungan oleh presiden saat pimpinan Soeharto mendapat keringanan sendiri guna di izin impor dibanding pada competitor lainnya (Mobarak & Purbasari, 2005). Dan juga, ikatan politik pula membawa kerugian guna perusahaan. Kerugian ada sebab politisi memakai pengaruh mereka atas ketetapan perusahaan guna tujuan politik. Hal ini sudah melanggar praktek tata usaha perusahaan yang baik dan mengarah pada praktik teori keagenan. (Chaney et al. 2011) menampakkan kalau “perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kualitas kinerja secara akuntansi lebih buruk dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik”. Dengan contoh, di Negeri Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN selaku perusahaan yang tergolong kategori terpaut *Political Connection* termasuk pada putaran korup.

Jajaran direksi BUMN yang sudah dipercaya pemerintah belum sanggup melawan pelanggaran tata usaha perusahaan yang bagus oleh partai politik dan afiliasi partai. Sebuah rupa *Political Connection* ialah ada jalinan anggota komite atau direksi yang merangkap jabatan atau menjabat sebagai politikus, pejabat pemerintah, pejabat militer, mantan pejabat pemerintah, atau mantan pejabat militer yang terafiliasi dengan partai politik. Bagi (Wulandari & Raharja 2013) menjabarkan kalau “dewan direksi dan dewan komisaris suatu perusahaan yang terkoneksi secara politik memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan”. Hal ini sudah menampakkan kalau *Return On Assets (ROA)* perusahaan yang berkorelasi politik punya kemampuan perusahaan sangat minim

disbanding oleh perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Tapi, riset (Dicko & Khemakem 2015) menjabarkan kalau “*Political Connection* erat hubungannya secara positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan akan tetapi penelitian ini juga menunjukkan apabila terdapat faktor-faktor lain penyebab terkoneksi politik diteliti secara individual justru memberikan hasil yang lebih positif dan signifikan”.

Contoh kasus perihal perusahaan yang terkoneksi politik pulsa sudah mengusut kasus yang melibatkan perusahaan politik dan mematenkan Inisial NM, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, selaku tertuduh korupsi pada 23 Agustus 2016. Antara 2009 dan 2014, NM dituduh mengambil suap lebih dari Rs 60 milyar sehubungan dengan mendapatkan izin untuk perusahaan tambang di provinsi Bombana dan Buton. Penerbitan izin pemakaian lahan yang melibatkan perusahaan tambang, seperti yang dilangsungkan NM sekarang, sering dilakukan guna keperluan pribadi oleh para pemimpin lokal. Praktik ini lazimnya dilangsungkan di kawasan yang banyak akan sumber daya alam dan erat kaitannya guna penyelenggaraan penunjukkan kepala daerah (pilkada). Wilayah yang kaya oleh sumber daya alam condong mengeluarkan sangat banyak izin untuk perusahaan pertambangan setiap kali sebelum pemilihan. Persetujuan diberikan pada investor oleh manajer regional. Tapi, memberi konsesi pada investor pertambang itu tidaklah gratis dan kerap kali diikuti dengan adanya suap dan tip dalam bentuk imbal jasa atau *kickback*. Guna tiap izin yang diterbitkan, nilai retribusinya bisa sampai ratusan hingga milyaran rupiah. Bagi artikel (Indonesian Corruption Watch) menyatakan kalau “negara sering kecolongan

akibat kekurangan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak”. Guna berbicara perihal keterbukaan negara, Divisi Pengawasan dan Analisis Budget ICW saat ini focus di pendapatan ⁵ dari sumber daya alam, utamanya divisi tambang (industri ekstraktif) dan pendapatan negara dari pajak. Dan juga, naik turunnya harga barang pertambangan di pasar internasional menimbulkan fluktuasi besar dalam penjualan perusahaan secara menyeluruh. Penjualan berpautan langsung dengan profitabilitas yang ditakar pakai Return on Assets (ROA). Riset ini memakai ROA guna menakar kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, dalam harga jual condong memainkan peranan yang sangat genting dalam menetapkan kinerja perusahaan di sektor pertambangan. maknanya, baik perusahaan terafiliasi dengan partai politik ataupun independen, turunnya penjualan yang signifikan akan menurunkan ROA perusahaan.

Studi kasus yang kedua ialah hubungan politik antar ² Grup Permai dan M.Nazaruddin (sekretaris keuangan Umum Partai Demokrat di tahun 2010 dan anggota DPR RI tahun 2009–2014). Beragam projek pemerintah yang dicapai oleh perusahaan Grup Permai diantaranya projek Pengembangan Fasilitas Teknis ² Vaksin Flu Burung nilainya Rp 718,8 milyar oleh Kementerian Kesehatan dan didapat oleh PT Anugrah Nusantara, projek Pemasokan Alat Bantu Belajar guna Dokter/ Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan, termasuk rumah sakit rujukan nilainya Rp 492 milyar oleh Kementerian Pendidikan didapat oleh PT Mahkota Negara, projek Pembangunan STPI Curug nilainya Rp 114,59 milyar guna 13 pesawat latihan dan dua simulator sayap didapatkan oleh PT Anugrah

Nusantara, sebagian Mengakuisisi projek lanjutan dari kementerian lain (Koran Tempo, 2012).

Sebuah faktor lain yang diyakini memengaruhi kinerja keuangan perusahaan yaitu *Political Cost*. Biaya politik berpautan pada tolak ukur perusahaan, sebab perusahaan besar menanggung lebih banyak biaya politik daripada perusahaan mini. Performa perusahaan yang ditakar dengan strata rasio ROA yang besar, menampakkan pemakaian asetnya dengan baik guna keperluan pemegang sahamnya. ROA yang rendah ialah hasil dari kehandalan perusahaan guna menciptakan laba yang minim dan biaya bunga yang besar sebab pemakaian leverage di atas rerata, yang duanya menghasilkan laba bersih yang relatif minim. “*Political Cost* muncul karena danya konflik kepentingan antara pemerintah yang melakukan pengalihan kekuasaan sesuai peraturan dengan perusahaan sebagai objek peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Biaya politik dikeluarkan perusahaan untuk Tindakan-tindakan politis seperti pajak, regulasi atau peraturan, subsidi pemerintah, tuntutan buruh dan lain sebagainya”. (Sarwinda & Afriyenti, 2015).

Selain keberadaan *Political Cost*, struktur kepemilikan saham pula bisa memengaruhi performa ² perusahaan. Hasil riset (Sujoko dan Soebiantoro 2007) menampakkan kalau “struktur kepemilikan, faktor intern, faktor ekstern, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan saham oleh institusi mendorong pemilik untuk melakukan peminjaman kepada manajemen sehingga manajemen terdorong untuk meningkatkan kinerjanya”. struktur kepemilikan saham memegang peranan genting guna menetapkan nilai

perusahaan. Struktur kepemilikan saham disebut genting bagi sebuah perusahaan dan diyakini bisa memengaruhi kinerja perusahaan guna menggapai maksimalnya nilai perusahaan sebab berhubung dengan ada pengaruh yang dipunya dan pula hal itu sanggup menjabarkan keterikatan dari yang punya guna mengamankan perusahaan. Tapi inilah hasil riset (Sabrina 2010) menampakkan kalau “pada struktur kepemilikan, tidak terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut dikarenakan keberadaan manajer dan pemegang saham kurang memiliki pengaruh dalam peningkatan kinerja perusahaan”. Maka dari itu, masih ada ketidaksesuaian hasil riset perihal wujud kepunyaan pada performa perusahaan.

Ada sedikit riset soal dampak kebijakan pada kinerja perusahaan, atau kebijakan dari pandangan akuntansi. Selain itu, periset tertarik guna melangsungkan riset ini sebab sudah disahkannya ² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 dan 35 yang menyusun tentang sumber dana dan batasan amal kepada partai politik. Sumber pendanaan partai politik antara lain iuran anggota, bantuan hukum, dan dukungan dana dari APBN/APBD. Batas kontribusi individu adalah Rp 1 milyar per orang pada setiap tahun fiskal dan batas kontribusi perusahaan dan/atau entitas adalah Rp 7,5 milyar per perusahaan dan/atau entitas pada tahun buku apa pun. Dengan cara ini, perusahaan dan partai politik saling terkait. riset ini berfokus di ³⁵ perusahaan tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai 2020.

55 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang itu, rumusan masalah di riset ini, Apakah *Political Connection*, *Political Cost*, dan Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Pertambangan yang *Go Public*.

16 1.3 Tujuan Penelitian

Selaras oleh rumusan masalah dalam riset, jadi tujuan penelitian ialah : Guna menguji secara empiris faktor *Political Connection*, *Political Cost*, Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor pertambangan yang *go public*.

32 1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan riset ini bisa memberi manfaat diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Guna para kademisi, riset ini didambakan bisa menambahkan khasanah riset soal performa perusahaan.

2. Bagi Investor

Guna keperluan investor. riset ini bisa digunakan selaku patokan guna bahan penilaian pemungutan keputusan investasi. Dan dana yang dipunya, apa nanti investor condong untuk melangsungkan investasi di perusahaan yang terkorelasi politik atau di perusahaan yang tidak terkorelasi politik.

3. Buat Penulis

Bagi penulis riset ini ialah sebuah bukti nyata hingga bisa meninggikan kehandalan periset guna menerapkan teori-teori yang sudah didapat sesudahnya, khususnya guna menelaah kinerja perusahaan.

1.5 Sistematika Penelitian

Berikut ini mau dijabarkan soal sistematika penulisan riset untuk memudahkan pembaca untuk memahaminya. Riset ini dijabarkan dalam lima bab dengan penjabaran pada tiap-tiap bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan soal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari riset.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjabarkan soal beragam teori yang menyokong pada riset, hipotesis riset yang dilangsungkan, dan riset yang terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkankan soal variabel riset, populasi, sampel, data yang dipakai di riset dan model analisis yang dipakai.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Bab ini menjabarkan soal deskripsi umum objek riset, analisis data dan interpretasi hasil.

BAB V : SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Bab ini menjabarkan kesimpulan yang juga rangkuman dari keutuhan hasil riset yang didapat pada pembahasan dan saran bagi riset seterusnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Bagi (Dessy, 2008) “Perspektif hubungan keagenan ialah dasar yang digunakan untuk memahami koneksi politik. Masalah konflik agensi dalam perusahaan biasanya terjadi karena *principal* tidak dapat berperan aktif dalam manajemen perusahaan”. Sisi ⁵ *principal* mempertanggungkan otoritas dan kewajiban pengolahan perusahaan pada tiap agen guna bekerja pakai nama yang punya dan keperluan yang punya. Sebabnya, ⁵ konflik agensi (*agency conflict*) yang sukar disandingkan dengan teori agensi. Bagi (Makaombohe et al., 2014) ¹⁷ Teori keagenan (*agency theory*) ialah “suatu bentuk kontrak yang melibatkan seseorang atau lebih (*principal*) yang memberikan kuasa kepada orang lain (*agent*) untuk menjalankan kegiatan berdasarkan kepentingan principal, yang mencakup pendelegasian tugas atau wewenang atas decision making kepada *agent* sesuai dengan kontrak yang telah disepakati”. ⁴² *Agency theory* menjabarkan “hubungan keagenan yang terjadi antara satu atau lebih orang (*principal*) dengan orang lain (*agent*) dalam sebuah kontrak, dimana agent diminta untuk mewakili principal dalam membuat keputusan” (Astria, 2011). *Principal* ialah pemegang saham yang diwakilkan oleh dewan pengawas sedang *agent* ialah pengurus pengelolaan perusahaan yang diwakilkan oleh dewan direksi. “Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dan prinsipal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan yang

besar. Prinsipal dan agen juga sama-sama menghindari adanya risiko” (Astria, 2011).

Bagi (Makaombohe et al. 2014) ada 3 dugaan yang melandasi teori keagenan, ialah “(1) pasar yang normal dan kompetitif, (2) nexus dari asimetri informasi adalah hubungan negatif antara pemilik dan manajer, (3) struktur modal optimal menghendaki alat yang terbatas”. Di teori keagenan menjabarkan soal problem asimetri informasi (*information asymetry*). Dan juga problem asimetri informasi, (Winda et al. 2016) menjabarkan kalau “konflik kepentingan antara principal dan agent dikarenakan kemungkinan agent tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan principal, sehingga hal ini menimbulkan munculnya biaya keagenan (*agency cost*)”. *Agency cost* bisa dimaknai selaku beban yang diterbitkan oleh principal guna melangsungkan pengamatan pada agent, pengeluaran yang mengekang timbul oleh agent, dan munculnya residual loss.

Di riset yang dulu, (Aziz & Hartono 2017) menjabarkan teori keagenan dianggap kalau “semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Prinsipal hanya tertarik pada keuntungan atas investasi yang ditanamkan, sedangkan agen akan merasa puas atas penerimaan kompensasi keuangan dengan syarat yang menyertai hubungannya”. Jalinan antar duanya pada lazimnya sukar timbul sebab ada keperluan yang saling berlainan. Bagi (Anthony dan Govindarajan 2012) “hubungan agensi ini ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut”. pada sebuah perusahaan, pemilik saham ialah principal dan CEO ialah

agen pemegang saham. Pemegang saham mengontrak CEO dan mendambakan ia guna berkerja guna keperluan mereka. Di tahapan yang begitu bawah, CEO ialah principal dan manajemen unit bisnis ialah agen.

Bagi (Ghozali dan Chariri 2007), menjabarkan kalau ada 3 jalinan keagenan diantaranya :

- a. Diantara pemegang saham (pemilik) dan manajemen, ketika manajemen punya total saham yang sangat minim daripada perusahaan lain, jadi manajemen bisa condong melaporkan pendapatan yang lebih besar atau sederhana. Hal ini disebabkan mereka mendambakan dividen ataupun keuntungan modal dari saham yang dipunyanya. Sedang manajer mau diakui kemampuannya baik dan menerima bonus, jadi manajer melaporkan laba yang lebih besar. Tapi bila manajer memiliki lebih tinggi daripada para investor lain, jadi manajemen kadang melaporkan keuntungan sangat sederhana.
- b. Diantara manajemen dan kreditur, manajemen kadang mengungkapkan pendapatannya lebih besar sebab pada lazimnya kreditur berasumsi kalau perusahaan dengan profit yang besar bisa membayar hutang dan bunga tepat waktu.
- c. Antara manajemen dan pemerintah, manajemen kadang melaporkan laba secara sederhana. Hal ini disebabkan guna menyingkirkan pengawasan yang sangat besar oleh pemerintah, para analisis sekuritas dan pemangku kepentingan yang lain. Pada lazimnya perusahaan yang tinggi dibebankan oleh beragam konsekuensi.

Pada pengertian itu bisa dirangkum kalau ada 3 jalinan keagenan ialah jalinan antar pemilik saham dan ⁶² manajemen, manajemen dan kreditur dan manajemen dan pemerintah.

2.1.2 Teori *Rent Seeking*

Dalam kajian ekonomu politik *rent seeking* atau di Indonesia di kenal dengan perburuan rente adalah sesuatu yang menginginkan pendapatan lebih dengan cara perjanjian, menggunakan kekuasaan dalam bisnis dan juga monopoli, yang dilakukan dengan cara yang tidak sehat di dalam pasar. Kekuasaan dalam bisnis tersebut dilakukan untuk mempengaruhi pasar sehingga terjadi penyimpangan yang dilakukan untuk kepentingan sendiri. *Rent seeking* yang ada sebab dilangsungkannya jalinan antar bisnis dan politik di saat sekarang ini ialah pokok dari korupsi, ialah orang yang melangsungkan *rent seeking* (*rent seekers*) memakai bagian paling tinggi pada sumber daya punya negara guna keperluan sendiri atau familinya. Jalinan ini dilangsungkan di luar jalinan publisitas yang baik, disaat tiap pengusaha melangsungkan penawaran dengan cara bayar atau memberi uang (secara individu) pada pejabat publik (politisi/ pemerintah/ birokrat) guna mempercepat keperluan pengusaha itu. “Untuk menghilangkan kegiatan *rent seeking* yang mengakibatkan terjadinya korupsi tersebut perlu dilakukan beberapa hal yaitu, memperkuat keterbukaan dan demokrasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para penyelenggara negara melalui reformasi birokrasi, hukum yang tegas serta dan kejelasan peraturan-peraturan atau undang-undang yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara” (Solihah, 2016). Hal yang jadi pelayanan

utama dan sarana lain bisa berbentuk kesenangan pajak, regulasi, aturan, pengaturan, dan lainnya. Pemikiran soal *rent seeking* kemudian bertumbuh jadi sebutan koneksi politik (*political connection*).

⁵ 2.1.3 *Political Connection*

“Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah” (Purwoto, 2011). “*Political connection* adalah jika pemegang saham otoritas atau petinggi perusahaan adalah anggota parlemen, menteri atau kepala negara, terkait dengan pejabat-pejabat negara, lembaga kenegaraan” (Faccio, 2006). (Adhikari dkk 2006) menambahkan bahwa “kepemilikan langsung oleh pemerintah dapat dilihat sebagai koneksi politik. Dengan demikian koneksi politik dapat diartikan sebagai hubungan kedekatan antara perusahaan dengan pemerintah”.

Bagi (Faccio 2006), “perusahaan yang memiliki koneksi apabila setidaknya salah satu pemegang saham besar atau salah satupimpinan perusahaan baik itu CEO, presiden, wakil presiden maupun sekretaris adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan dengan politikus atau partai politik”.

¹⁴ Perusahaan yang punya jalinan politik yaitu konglomerat atau perusahaan yang punya jalinan sangat dekat oleh pemerintah bisa dimaknai selaku perusahaan yang punya pemerintah seperti perusahaan yang berupa BUMN atau BUMD. Sedang ¹¹ konglomerat (pemilik) yang punya jalinan dekat oleh pemerintah ialah pemilik perusahaan atau konglomerat ialah tokoh politik terpandang.

(Faccio 2006) menjabarkan kalau “apabila *political connection* sebagai penentu utama keputusan investasi yang terdistorsi, akan mengakibatkan nilai perusahaan yang lebih rendah jika tanpa ada *political connection*”. (Leuz dan Oberholzer 2006) memberi bahan kalau di Indonesia, “perusahaan – perusahaan yang menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan dengan pemerintah baru saat patron mereka jatuh dari kekuasaan, menyebabkan perusahaan – perusahaan tersebut memiliki kinerja rendah dan kemudian beralih ke pembiayaan luar negeri”. Kemudahan lain yang di peroleh bagi perusahaan yang berkerjasama politik ialah gerbang yang sangat gampang guna pembayaran hutang, pajak yang sangat minim, dan ketangkasan pasar yang sangat tinggi. (Ang, et. al., 1997) memberi gambaran dari hasil laporan risetnya kalau “bankir sering dipaksa untuk memberikan pinjaman bagi proyek – proyek yang dilakukan oleh perusahaan yang berkoneksi politik meskipun proyek tersebut diperkirakan tidak menguntungkan”. Contoh yang lain memberi sokongan selanjutnya kalau pembeda pada sikap pinjaman pada bank BUMN dipengaruhi oleh hasil penetapan partai yang bertautan dengan bank. Perilaku itu ialah peralihan kekayaan dari konsumen atau warga negara guna perusahaan, yang membuat peninggian nilai perusahaan.

Menurut (Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 02/1.02/PPATK/02/15) Soal kelompok pemakai Jasa Yang sanggup Melaksanakan Tindak Pidana Pencucian Uang jadi acuan guna menetapkan Politically Exposed Person (PEP). Politically Exposed Person (PEP) diantaranya:

1. Pejabat Negara

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Menteri Wakil Menteri, dan jabatan yang berpangkat menteri;
 - c. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Hakim Agung di Mahkamah Agung dan hakim di semua badan peradilan
 - e. Hakim Konstitusi
 - f. Anggota Komisi Yudisial;
 - g. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden;
 - h. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - i. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
 - j. Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 - k. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
 - l. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan selaku duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
 - m. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - n. Bupati atau Walikota;
 - o. Wakil Bupati atau Wakil Walikota;
 - p. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Lembaga sejenis di daerah; dan
 - q. Pejabat negara lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Pimpinan Instansi Pemerintah setingkat atau setara eselon I;
 3. Pejabat yang punya fungsi strategis seperti;

- 3
 - a. Direksi, Komisaris dan Pejabat structural lain di Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - c. Pejabat eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan kepolisian;
 - d. Jaksa;
 - e. Penyidik;
 - f. Panitera Pengadilan;
 - g. Pimpinan dan Bendaharawan Proyek
 - h. Pejabat yang ada disector minyak dan gas;
 - i. Pejabat yang ada disector mineral dan batu bara; dan
 - j. Pimpinan Komisi yang dibentuk berlandaskan pengaturan perundang-undangan;
4. Pejabat yang berlandaskan ketetapan kementerian yang ada di urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
- 58
 5. Pengurus partai politik atau anggota partai politik.

2.1.4 Political Cost

“*Political cost* adalah biaya politik perusahaan yang timbul dari adanya konflik kepentingan antara manajemen dengan pemerintah, masyarakat, media yang menyorot perusahaan” (Ardilasari, 2014). Sedang “*political cost* adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk semua tindakan-tindakan politis seperti pajak, regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, upah buruh dan lain-lain” (Sarwinda & Afriyenti, 2015). Bagi (Fatimah & Susanti 2018)

“*Political cost* merupakan biaya politik yang dibebankan oleh perusahaan apabila mendapatkan keuntungan tinggi, yang akan menarik perhatian media, masyarakat, investor dan konsumen”. Biaya politis dapat timbul sebab konflik kepentingan antar pemerintah dan perusahaan selaku regulator dan penyuluh masyarakat guna memindahkan aset perusahaan selara dengan ketetapan yang berlaku. Dari pernyataan-pernyataan itu bisa dirangkum *political cost* ialah biaya yang bisa dilimpahkan pada perusahaan jikalau perusahaan punya profit yang besar, yang bisa memikat animo media dan pelanggan. Dengan ada biaya politik disebabkan keuntungan perusahaan yang besar bisa memikat animo konsumen dan media. Tolak ukur perusahaan atau *firm size* kerap kali dipakai guna menjabarkan *political cost hypothesis*. “Ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki risiko perusahaan dan identitas modal yang tinggi, begitu juga sebaliknya” (Ardilasari, 2014).

Pertikaian kepentingan antar perusahaan (manajer) dan pemerintah yang punya otoritas guna mengubah aset di perusahaan pada warga pakai peraturan yang ada (peraturan pajak ataupun peraturan lain) jadi memunculkan beban politik. Perusahaan-perusahaan besar kemungkinan bisa menjumpai biaya-biaya politik di waktu khusus misal ada perselisihan luar negeri. Di saat perusahaan tidak sanggup beradaptasi dengan bagus pada pasar mebuat timbulnya turunnya laba. Perusahaan besar bisa mendapat ketertarikan yang tinggi dari pemerintah dibanding perusahaan yang kecil. Bila perusahaan mengungkapkan laba yang sangat besar, jadi pemerintah bisa menuntut layanan public yang sangat besar.

2.1.5 Struktur Kepemilikan Saham

Menjalankan bisnis yang makin terpisah dari kepunyaan perusahaan ialah sebuah ciri ekonomi modern, hal ini selaras oleh agency theory yang mendambakan pemilik perusahaan (*principal*) memberikan pengolahan perusahaan pada tenaga khusus (*agent*) yang lebih tau guna menerapkan bisnis. Tujuan pemisah manajemen dan kepunyaan suatu perusahaan ialah biar pemilik mendapat profit sebesar-besarnya dengan biaya yang efektif.

Struktur kepemilikan tergambar baik dalam struktur ekuitas ataupun struktur utang hingga lewat struktur itu bisa dicerna, nampaknya rupa masalah keagenan yang bisa timbul. Ada bermacam hal yang harus dilihat di struktur kepemilikan, diantaranya :

1. Kepemilikan sebagian kecil dari manajemen perusahaan memengaruhi kecondongan guna perusahaan untuk tidak hanya mencapai tujuannya, tetapi juga untuk memaksimalkan nilai pemegang saham.
2. Kepemilikan yang terpusat memberikan bonus pada pemegang saham rata-rata guna ikut serta secara aktif pada perusahaan.
3. Identitas pemilik menetapkan prefensi tujuan sosial perusahaan dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Contohnya, perusahaan punya pemerintah condong guna mengejar tujuan politik daripada tujuan perusahaan.

Problem keagenan muncul sebab ada konflik kepentingan antar pemilik perusahaan (pemegang saham utama) dan direktur pelaksana. Sebab itu, struktur kepemilikan dirasa selaku hal yang penting guna melewati masalah keagenan. sebab manajer selaku pihak yang berkompeten untuk memimpin perusahaan

punya kewenangan yang cukup untuk menjalankan tugasnya, sehingga dapat dicapai kinerja perusahaan yang baik dengan struktur kepemilikan yang baik.

Struktur kepemilikan ialah pihak yang punya saham tertinggi pada perusahaan. Harta milik perusahaan bisa berbentuk harta milik perorangan, pemerintah, dan lembaga swasta. “Struktur kepemilikan dipercaya oleh beberapa peneliti mampu mempengaruhi jalannya perusahaan sehingga berdampak pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan” (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Jika performa perusahaan jelek, berimbas akan sulit bagi perusahaan guna menggapai tujuannya. Misal, kinerja perusahaan yang jelek menyebabkan kondisi kesulitan keuangan. Saat perusahaan ada di fase kesulitan keuangan, tujuan perusahaan sukar digapai. Hal itu bilamana tidak cepat diperbaiki, bisa menyebabkan gulung tikar di perusahaan. Dan begitu struktur kepemilikan bisa memengaruhi performa perusahaan yang nanti bisa memengaruhi risiko perusahaan guna mengalami pailit.

(Haryono 2005) pula memberi pengertian soal struktur kepemilikan. “Struktur kepemilikan (*ownership structure*) merupakan komposisi modal antara hutang dan ekuitas termasuk juga proporsi antara kepemilikan saham *inside shareholders* dan *outside shareholders*”.

Kepemilikan perusahaan memiliki beragam karakter, diantaranya kepemilikan terdesentralisasi dan kepemilikan terpusat. Struktur kepemilikan yang luas berarti kepemilikan cenderung tidak dikelola dengan baik sebab rapuhnya pengamatan. Hal ini berlaku khususnya para pemilik saham minoritas. Mereka kadang terpuak guna melangsungkan pengawasan sebab bisa membayar

biaya pengawasan atau faedah yang mau diambil sangat minim. Struktur kepemilikan yang terpusat memberi tunjangan pada para pemegang saham guna melangsungkan pengawasan Tindakan manajemen biar selaras dengan keperluan pemilik. Ini juga suatu profit dari kepemilikan yang terpusat. Tapi juga, kepemilikan yang terpusat bisa pula menampakkan kerugian guna nilai perusahaan sebab suara pemegang saham minoritas hilang pada pemungutan ketetapan strategis meski kadang ketetapan itu lebih akurat, (Rofiqoh dan Jatiningrum 2004 dalam Haryono 2005). “Kepemilikan yang terkonsentrasi juga menimbulkan kerugian lain yaitu pemegang saham dominan menanggung risiko bisnis dan biaya pengawasan sendiri” (Haryono (2005).

Dan lazimnya, struktur kepemilikan saham perusahaan pada laporan keuangan berbentuk kepemilikan manajerial, institusional, dan publik. (Nuraeni 2010) melaksanakan riset soal “pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap kinerja perusahaan”. (Nuareni 2010) “membagi struktur kepemilikan menjadi empat yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, serta kepemilikan asing. Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan yang diuji adalah kepemilikan saham institusional serta kepemilikan saham manjerial”.

2.1.5.1 Kepemilikan Institusional

“Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, serta institusi lainnya pada akhir tahun” (Shien, et.al. 2006). Bagi (Jama’an 2008) berkata kalau “kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi”. “Kepemilikan institusional adalah presentase

saham yang dimiliki oleh institusi dari keseluruhan saham perusahaan yang beredar” (Herman dan Purwanto, 2014).

Bagi (Permanasari 2010) menjabarkan kalau “kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antar manajer dan pemegang saham”. Kehadiran investor institusi dirasa tepat sebagai prosedur kontrol yang tepat pada semua ketetapan yang dibuat oleh manajemen. Hal ini dikarenakan investor institusi terjun pada pemungutan keputusan strategis hingga tidak gampang percaya pada praktik manipulasi keuntungan. “Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi” (Sujoko dan Ugy, 2007). Kepemilikan institusi punya implikasi genting bagi mengawasi manajemen sebab dengan ada kepemilikan institusi bisa memudahkan peninggian pengawasan yang lebih baik. Monitoring itu pastinya bisa menjanjikan kemakmuran bagi pemegang saham, dan pengaruh kepemilikan institusi selaku regulator dibatasi oleh investasi besar mereka dipasar modal. “Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer” (Haruman, 2008). Bagi (Shleifer dan Vishny 1997 di Barnae dan Rubin 2005) kalau “institusional *shareholders*, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan”. Sama halnya riset (Wening 2009) “semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan”. Kepemilikan institusional punya kelebihan diantaranya :

1. Punya rasa profesionalisme guna menelaah info hingga bisa megetes kecakapan informasi.
2. Punya dorongan yang besar guna melangsungkan pemantauan yang lebih ketat pada kegiatan yang ada di dalam organisasi.

²⁰ 2.1.5.2 Kepemilikan Manajerial

“Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai presentase suara yang berkaitan dengan saham dan option dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan” (Sholekah & Venusita, 2014). Bagi (Sukirni 2012), “kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan”. Pada hal ini, manajer memainkan peran yang begitu penting sebab manajer melangsungkan merencanakan, mengatur, mengarahkan, pemantauan dan membuat keputusan.

Kepemilikan manajemen merupakan presentase tingginya kepunyaan saham pihak manajemen. manajer pada sebuah perusahaan ialah pihak yang berperan aktif guna pengambilan keputusan soal pengelolaan perusahaan. Harta yang dikelola ini ialah imbalan yang diberi oleh perusahaan pada pegawainya. “Kepemilikan manajerial memiliki dua peranan yang berbeda. Pertama manajer bertindak sebagai pemilik perusahaan dan kedua, manajer bertindak sebagai manajer perusahaan. Peranan seperti ini bisa mempengaruhi kinerja manajer saat bekerja dan dapat memicu timbulnya keinginan untuk mempertahankan posisi di dalam suatu perusahaan” (Angraeni & Ceacilia, 2009).

“Apabila kepemilikan manajerial meningkat, pihak manajemen tentunya akan mengutamakan kepentingan pemegang saham karena mereka juga sebagai pemegang saham. Manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham” (Herman & Purwanto, 2014). Dengan ada kepemilikan manajemen bisa menggabungkan tujuan manajemen dan pemegang saham.

“Manajer dapat kesempatan untuk terlihat dalam kepemilikan saham dengan tujuan menstarakan dengan pemegang saham. Dengan kebijakan ini manajer diharapkan memiliki kinerja yang baik” (Dewi, 2008). “Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah” (Aprianto & Arifah, 2014).

2.1.6 Kinerja Perusahaan

“Kinerja perusahaan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba”. (Dessy, 2008). (Nuraeni 2010) berargumen kalau “kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola mengalokasikan sumber daya yang dimiliki”. Oleh karena itu, kinerja ialah kehandalan perusahaan guna mengolah dan mendistribusikan sumber daya yang dipunya guna menggapai tujuan yang sudah dipatenkan. performa pula ialah hal genting yang wajib digapai oleh tiap semua perusahaan, sebab kinerja mencerminkan dari kemampuan organisasi guna menyebarkan sumber dayanya.

Evaluasi kinerja ialah penetapan secara berkala kinerja operasional sebuah golongan, bagian-bagian kelompok dan pegawai terhadap tujuan, kriteria dan kinerja yang sudah diberikan dulunya. Sedang Kinerja perusahaan tersendiri ialah kecakapan perusahaan guna menjabarkan bisnisnya. “Penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan dan dari segi perubahan harga saham. Nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya” (Dessy, 2008). Performa juga mencerminkan dari kehandalan perusahaan guna mengatur dan mendistribusikan sumber daya. Tujuan dari penilaian performa ialah guna menyemangati pegawai guna menggapai tujuan organisasi dan bisa mencukupi kriteria tingkah laku yang sudah dipatenkan dulunya biar jadi pembeda hasil dan tindakan yang dimau. Kriteria tingkah laku bisa berbentuk kebijakan manajer atau rencana formal yang dilampirkan pada perhitungan.

“Kinerja perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan dan dari segi analisis perubahan harga saham” (Nuraeni, 2010). (Nuraeni 2010)pula menjabarkan kalau “tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standat perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membedakan hasil dan tindakan yang diinginkan”.

Ini ialah beragam ratio yang dipakai guna menakar kinerja perusahaan (Sartono, 2011):

1. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas ialah ratio yang mencerminkan kehandalan perusahaan guna mencukupi kewajiban keuangan yang jangka pendeknya secara tepat waktu.

2. Rasio aktivitas

Rasio aktivitas ialah ratio yang menampakkan kalau sumber daya sudah dipakai secara optimal. lalu dengan cara membandingkan rasio 30 kegiatan terhadap kesadaran industri, Anda dapat menentukan tingkat efisiensi perusahaan dalam industrinya.

3. Rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas bisa menakar betapa besar kehandalan perusahaan mendapat laba baik pada jalinan penjualan, aset ataupun laba guna modal itu sendiri. Rasio profitabilitas dipisah jadi enam kategori yaitu : *gross profit margin (GPM)*, *net profit margin (NPM)*, *operating return on assets (OPROA)*, *return on assets (ROA)*, *return on equity (ROE)*, *operating ratio (OR)*.

4. Rasio solvabilitas (*Leverage*)

Financial leverage menampakkan presentase atas pemakaian utang guna membayar investasi. Perusahaan yang tidak punya *leverage* bermakna memakai ekuitas 100%. 5. Rasio Pasar (*Market ratio*) Rasio ini menampakkan informasi utama perusahaan yang diungkap pada basis per saham. Rasio nilai pasar perusahaan memberi implikasi guna manajer soal penilaian investor pada kinerja perusahaan di masa lalu dan prospek di masa depan yang akan terjadi. Ada beragam rasio guna menakar nilai

pasar perusahaan, diantaranya *price earning ratio* (PER), *market-to-book ratio*, *Tobin's Q*, dan *price / cash flow ratio*.

Tiap - tiap ratio punya karakter yang beda, dan memberi info pada manajemen dan investor tentang topik yang beda pula. Sebuah pengukuran ialah nilai kuantitatif yang bisa dipakai guna menakar skala dan tujuan penskalaan. Pengukuran kinerja bisa bersifat finansial dan non-finansial. Pengukuran keuangan dikatakan pada ketetapan moneter. Sedang ukuran non keuangan ialah data kuantitatif yang dibuat diluar system akuntansi formal. (Horne & Wachowicz 2005) menjabarkan kalau “untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, analisis keuangan membutuhkan ukuran keuangan yang pasti”. Info tentang performa perusahaan, khususnya profitabilitas, diharuskan guna menilai peralihan kebolehan sumber daya ekonomi yang bisa saja terkendali di masa depan. Info kinerja berguna buat mengirakan daya tampung perusahaan untuk arus kas dari sumber daya yang tersedia dan pula guna mengembangkan penilaian soal efektivitas perusahaan guna memakai sumber daya.

Bagi (Chantrataragul 2007) “menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva”. Tingginya ROA bisa ditakar dengan memakai rumus berikut ini :

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Earning ater tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Bagi (Hakim, 2006) “*Earning after tax* (EAT) merupakan laba bersih setelah pajak. *Total Assets* merupakan nilai buku total aktiva. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk

menghasilkan laba. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif pula atau rugi”. Hal ini menampakkan kehandalan dari modal yang diberikan dengan cara menyeluruh tidak sanggup menciptakan laba.

ROA punya kelebihan, berikut ini ialah (Hakim, 2006):

1. Ini adalah takaran yang menyeluruh, disaat semuanya memengaruhi laporan keuangan yang tergambar dari ratio ini.
2. Ringan diukur, ringan diresapi, dan begitu bermakna sebagai nilai yang mutlak.
3. Ini ialah denominator yang bisa dipakai di tiap unit organisasi dan bisnis yang bertanggung jawab atas pendapatan.

³⁹ 2.2 Hubungan Antar Variabel

² 2.2.1 Hubungan Antara *Political Connection* dengan Kinerja Perusahaan

“*Political connection* dapat dipandang sebagai sebuah situasi di mana setidaknya satu orang dari *top officer* sebuah perusahaan, pemegang saham besar perusahaan, atau kerabat mereka adalah pemegang jabatan politik tinggi atau seorang politikus yang menonjol” (Faccio 2006 di Wijantini 2006). “Perusahaan yang terhubung secara politik ditemukan menikmati beberapa keuntungan diantaranya yaitu akses mudah untuk pembiayaan peminjaman bank, keringanan pajak, kekuatan pasar, dan menerima kontrak pemerintah” (Wijantini, 2007). Hal ini searah oleh penjelasan (Wijantini 2007) kalau “beberapa perusahaan yang terkoneksi politis dapat dengan mudah memperoleh pendanaan utang dengan mendapatkan memo pinjaman dari politisi”.

2.2.2 Hubungan Antara ¹⁸ *Political Cost* dengan Kinerja Perusahaan

Political cost tergolong seluruh biaya (transfer modal) yang wajib dibayar oleh perusahaan sehubungan dengan aktifitas politik misalnya pajak, peraturan, bantuan pemerintah, biaya, undang-undang antimonopoli, permintaan buruh dan lainnya. “*Political cost* berkaitan dengan ukuran perusahaan karena perusahaan besar banyak mengandung *political cost* dibandingkan dengan perusahaan kecil, dan perusahaan yang banyak mengandung *political cost* akan cenderung melakukan manajemen laba untuk mengurangi *political cost*”. (Belkaoui, 2007) dan jadinya bisa meminimalkan keuntungan dan performa perusahaan. Perusahaan besar lazimnya lebih dilihat oleh negara dan warga. “Jika perusahaan besar mempunyai laba yang tinggi secara relatif permanen, maka pemerintah dapat terdorong untuk menaikkan pajak dan meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada perusahaan” (Calvin 2012).

2.2.3 Hubungan ¹⁴ Antara Kepemilikan Institusional dengan ¹⁰ Kinerja Perusahaan

“Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*)” (Siregar dan Utama, 2006). “Investor institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau di atas 5%” (Winanda, 2009). “Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor atau mengawasi perusahaan” (Faisal, 2005). “Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan mengurangi *agency cost*”

(Wahyudi dan Pawestri, 2006). Dengan ada pengawasan luar yang kuat jadi manajemen hati – hati guna pengambilan ketetapan.

2.2.4 Hubungan Antara Kepemilikan Manajerial dengan Kinerja Perusahaan

Ada kepunyaan manajerial, manajer bisa berlaku selaku pemilik dan pemegang kendali perusahaan. Hal itu yang menjadikan manajer berusaha meninggikan performa perusahaan hingga imbalan hasil yang diperoleh bisa lebih besar. “Apabila, kepemilikan manajerial melebihi batas tertentu, manajer akan berkuasa dan melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan pribadinya sehingga berpengaruh pada kinerja perusahaan” (Khamis, 2015). Riset itu menjelaskan kalau pengaruh kepemilikan internal pada kinerja perusahaan ditakar pakai Tobins Q, kinerja perusahaan meninggi bilamana kepemilikan internal 0% - 5% dan > 25% .Sedang di tiahap kepemilikan internal 5% - 25% bisa meminimalkan kinerja perusahaan. Riset itu menampakkan jalinan non- monotonik antar kedua variabel.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh *political connection*, potical cost dan wujud kepemilikan saham perusahaan pada performa perusahaan sudah banyak dilangsungkan, tapi masih sangat terbatas hingga jadinya menampakkan tidak konsisten. Bentuk timbulnya keterbatasan dan tidak konsistens itu membuatkan pembuktian selanjutnya lewat riset berikutnya, adapula riset yang dulu diantaranya :

1
Tabel 2.1

Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti	Judul	Metode Analisis	Kesimpulan
1.	Wulandari & Raharja (2013)	Analisis Pengaruh <i>Political connection</i> dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	Analisis Regresi Linier Berganda	<i>Political connection</i> berpengaruh terhadap Kinerja perusahaan. Sedangkan Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
2.	Nur'aeni (2010)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan asing dalam perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik

		Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia)	tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
3.	Dewata, dkk (2018)	Pengaruh Biaya Lingkungan, Kepemilikan Asing Dan <i>Political cost</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, biaya lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan asing dan <i>political cost</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.4 Hipotesis dan Model Analisis

2.4.1 Hipotesis

Pada penjabaran yang tergambar itu, lalu hipotesis riset ini yaitu berikut ini :

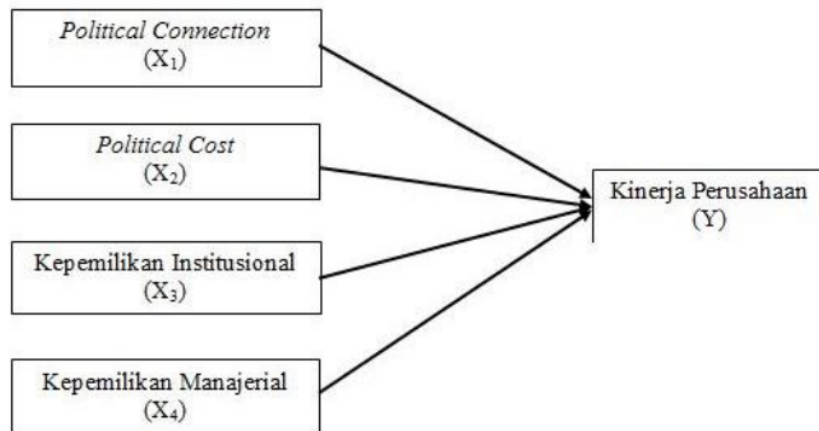
- H1 : *Political connection* ²⁹ berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan
- H2 : *Political cost* berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan
- H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan
- H4 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan

2.4.2 Model Analisis

Riset ini menggunakan tiga variabel diantaranya : *Political connection*, *Political cost*, ² *Kepemilikan Institusional*, dan *Kepemilikan Manajerial* pada *Kinerja Perusahaan*. Hingga berlandaskan telaah pustaka jadi bisa digambar kerangka pemikiran riset yang periset ilustrasikan pada rupa ³³ gambar berikut ini.

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan observasi yang akan dipakai di sebuah observasi ini yakni pendekatan observasi memakai metode observasi kuantitatif. Observasi kuantitatif ialah observasi yang mewajibkan guna menguras info lebih dulu soal sebuah tanda-tanda yang ada, dijabarkan dengan transparan apa yang mau diraih, membuat planing macam mana cara guna pendekatan, melaksanakan pemungutan data yang digunakan guna menyusun riset. Bagi (Kasiram 2008) menjabarkan kalau “pendekatan kuantitatif merupakan suatu proses untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui”. Riset ini mencakup *political connection*, *political cost*, struktur kepemilikan, dan performa perusahaan bagian tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 2018 sampai pada tahun 2020.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Kata (Sugiyono 2015), “populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi yang ditetapkan penelaah bermanfaat guna jadi pemutus dari hasil observasi yang mau ditemukan. Populasi di observasi ini yakni semua

perusahaan bagian tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2020. Hal ini disebabkan di saat melaksanakan *collecting data* laporan keuangan tahun 2021 masih banyak perusahaan yang menerbitkan.

65 3.2.2 Sampel

Bagi (Sugiyono 2015), “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel di riset ini pakai metode *Purposive Sampling*. “*Purposive Sampling* ialah metode pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan riset yang telah ditetapkan” (Sugiyono, 2015). Untuk pengambilan sampel itu sendiri yaitu diantaranya:

- 77
1. Perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI dan melahirkan data keuangan dengan cara gamplang berlarut-larut selama kurun 2018-2020
2. Perusahaan divisi pertambangan yang mempunyai data lengkap laras dengan kebutuhan di riset.
3. Perusahaan sektor tambang yang tidak menghadapi kerugian selama tahun 2018-2020 berturut-turut.

3.3 Identifikasi Variabel

Saat memberi ilustrasi dan patokan di riset, identifikasi variabel wajib dilaksanakan. “Menurut Sugiyono (2015), pengertian Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan”.

pada observasi ini ada dua variabel yang bisa di riset yakni variabel bebas dan variabel terikat. Variabel-variabel itu dijabarkan berikut ini :

a. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas yakni variabel yang mempengaruhi atau yang mampu memberi impact pada variabel yang lain. Pada observasi ini variabel bebas yang diambil guna ditelaah yakni *Political Connection* (X_1), *Political Cost* (X_2), Kepemilikan Institusional (X_3), dan Kepemilikan Manajerial (X_4).

b. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat ialah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat pada penelitian ini adalah Kinerja Perusahaan (Y).

3.4 Definisi Operasional Variabel

Bagi (Sugiyono 2015), “definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.

Definisi operasional variabel pada sebuah observasi ini:

3.4.1 *Political Connection*

Political connection atau koneksi politik ialah jalinan kedekatan antara perusahaan dan pemerintah atau politisi. Variabel *political connection* ditakar pakai variabel *dummy*. Kode 1 guna perusahaan yang terhubung politik dan 0 guna perusahaan yang tidak terhubung politik (*non-political connection*). Bagi (Wulandari & Rahrja 2013) Karakteristik *political connection* di riset ini ialah:

1. Dewan direksi dan/atau dewan komisaris double jabatan ialah politis yang tergabung oleh partai politik.

2. Dewan direksi dan/atau dewan komisaris double jabatan selaku pejabat pemerintah.
3. Dewan direksi dan/atau dewan komisaris double jabatan selaku pejabat militer.
4. Dewan direksi dan/atau dewan komisaris ialah mantan pejabat pemerintah atau mantan pejabat militer.
5. Pemilik perusahaan atau pemegang saham ialah politisi/pejabat pemerintah/pejabat militer/mantan pejabat pemerintah/mantan pejabat militer

3.4.2 ²⁰ *Political Cost*

Political cost ialah beban politik perusahaan yang muncul dari ada konflik kepentingan antar manajemen perusahaan dan pemerintah, masyarakat, media yang menyorot perusahaan. Ukuran perusahaan seringkali digunakan guna menjabarkan *political cost hypothesis*. Takaran perusahaan yang besar kadang punya resiko perusahaan dan identitas modal yang besar, begitu pula sebaliknya Menurut Dewata, (2018) variabel *political cost* ini diplotkan dengan takaran perusahaan yang ditakar pakai ⁴⁸ logaritma natural total pakai rumus berikut ini :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (total asset)}$$

⁵³ 3.4.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham yang dipunya oleh lembaga atau badan (institusi pemerintahan, lembaga luar negeri, perusahaan

swasta ataupun yang lainnya). Menurut Sartono (2010) besarnya kepemilikan institusional dapat ditakar menggunakan rumus berikut ini :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

3.4.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial ialah persentase saham yang dipunya oleh pihak manajemen yang terus aktif terjun guna pemungutan ketetapan perusahaan. Riset ini memakai total persentase kepemilikan manajerial pakai skala ratio sebab kepemilikan manajerial ialah persentase kepemilikan saham yang dipunya oleh direksi, manajer, dan dewan komisaris. Menurut Sartono (2010) Rumus guna menakar persentase kepemilikan manajerial ialah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

3.4.5 Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan penetapan takaran-takaran khusus yang bisa menakar kesuksesan sebuah perusahaan guna menciptakan laba. Dalam riset ini performa perusahaan ditakar dengan *Return on Assets* (ROA). Menurut Chantrataragul (2007) *Return on Assets* (ROA) bisa ditakar memakai rumus berikut ini :

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Earning after tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

3.5 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis data dan pendekatan yang dimanfaatkan maka riset ini merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya ialah diperoleh dari data laporan tahunan atau disebut dengan *annual report* dokumentasi ini didapat

dengan metode membuka web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id.

Untuk periode tahun data di riset ini yaitu 2018 hingga 2020.

3.6 Teknik Analisis

Secara umum, analisis data ialah sebuah cara sederhana guna merubah data ke dalam format yang bisa jadi begitu mudah dibaca, dipahami, dan ditafsirkan. Berikut ialah deskripsi teknik pengujian yang dipakai di riset ini:

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif bagi (Sugiyono 2015) ialah “statistik yang memiliki fungsi untuk memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan kemudian membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dan memberikan gambaran informasi terhadap karakteristik variabel penelitian antara lain yang dapat ditinjau dari rata-rata (*mean*), maksimum dan minimum, dan juga standar deviasi”.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Bagi (Ghozali 2015) “uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui adanya kemungkinan terjadinya bias dalam koefisien regresi pada persamaan tersebut”. Guna mendapati terjadi bias atau tidak, jadi dilaksanakan uji asumsi klasik contohnya uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Bagi (Husein Umar 2011) “uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur nilai residual terdistribusi normal atau tidak”. Guna model regresi yang

benar yakni dengan punya perputaran data yang teridentifikasi secara normal maupun yang dekat dengan normal juga. Model regresi yang bagus akan punya nilai residual yang tersebar normal. Maka uji normalitas tidak dilaksanakan di tiap-tiap variabel tapi di nilai residualnya. Metode yang dipakai di uji normalitas ialah pakai uji nonparamatik Kolmogorov Smirnov (K-S). Nilai signifikan di uji Kolmogorov Smirnov dipatenkan sejumlah 0,05 lalu ($\alpha = 0,05$ atau 5%). Bila didapat nilai signifikan $\geq 0,05$, jadi nilai itu dimaknai kalau data itu sudah terdistribusi dengan normal dan pula bisa dimaknai kalau bisa dipakai guna sebuah riset dan begitu pula sebaliknya, jikalau didapat nilai signifikansi $\leq 0,05$, jadi nilai itu diartikan kalau data itu tidak tersebar dengan normal.

3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Bagi (Wicaksono 2017) “Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Bila varians residual bervariasi dari tiap penglihatan ke penglihatan yang lain beda jadi dikatakan heteroskedastisitas, dan sebaliknya bila varian residual dari satu penglihatan ke penglihatan yang lain tetap jadi dikatakan homoskedastisitas”. Model regresi yang bagus ialah yang tidak ada heteroskedastisitas. Cara uji heteroskedastisitas di riset ini memakai uji Glejser. Uji ini dilaksanakan menggunakan cara meregresi nilai absolut residual (ABS_RES) selaku variabel terikat pada seluruh variabel bebas di model regresi. “Apabila nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel independen tidak signifikan, maka dapat diambil kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas” (Ghozali, 2015). Acuan pemungutan ketetapan adalah sebagai berikut:

1. Tidak timbul heteroskedastisitas

30
 Nilai t hitung < t tabel atau nilai signifikansi > 0,05

2. Terjadi heteroskedastisitas

Nilai t hitung > t tabel atau nilai signifikansi < 0,05

87 3.6.2.3 Uji Multikolinieritas

“Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas. Uji ini dilakukan bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi antar variabel independen dalam model regresi” (Ghozali, 2015). 4
 Model regresi yang bagus yakni apabila tidak adanya multikolinearitas. Tidak atau adanya multikolinieritas dapat diamati di besarnya 43
 Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jikalau nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, jadi bisa diambil kesimpulan kalau model regresi itu tidak mengalami masalah multikolinieritas.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Dalam pengujian ini apabila terjadi penyimpangan terhadap observasi dari penyimpangan yang lain atau bisa disebut juga dengan korelasi antara observasi menurut tempat dan juga waktu, konsekuensi dari ada suatu korelasi pada model regresi ini ialah variabel tidak akan menunjukkan dan memakai variabel populasi lebih jauh lagi. “Uji autokorelasi dilakukan bertujuan untuk menguji apakah ada atau tidak korelasi pada kesalahan yang terjadi saat periode t dengan kesalahan yang terjadi saat periode t-1 dalam model regresi linear” (Ghozali, 2015). Guna 70
 mengetes apakah ada atau tidak autokorelasi bisa memakai uji Durbin-Watson (DW). Bagi Santoso (2009) mengatakan kalau secara umum guna menetapkan autokorelasi bisa dipungut 39
 berikut ini :

- a. Angka D-W di bawah -2 bermakna terdapat autokorelasi.
- b. Angka D-W antara -2 sampai +2 bermakna tidak ada autokorelasi.
- c. Angka D-W di atas +2 bermakna ada autokorelasi negatif.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

“Analisis regresi berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent” (Wicaksono, 2017). Rumus persamaannya adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Kinerja Perusahaan (ROA)
a	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$	= Koefisien Regresi dari masing-masing variabel bebas
X_1	= Political Connection
X_2	= Political Cost
X_3	= Kepemilikan Institusional
X_4	= Kepemilikan Manjerial
e	= Error

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Uji Statistik t (Parsial)

Kata (Ghozali, 2015) “uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen”. Pengaruh yang

sangat menonjol dan tiap-tiap variabel independen ¹ guna menjabarkan variabel dependen dan tahap signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$) bisa ditetapkan lewat uji statistik t. Pengambilan ketetapan dilangsungkan berlandas pada ¹ perbandingan nilai t hitung tiap-tiap koefisien regresi dan t tabel senada oleh tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan penyebut ($df = n-k$), saat k yakni jumlah variabel bebas.

Hipotesis dihitung berikut ini :

- 1) Bilamana nilai signifikan t hitung $> t$ tabel maka H_0 diterima, maksudnya ada pengaruh signifikan antar satu variabel independen dan variabel dependen.
- 2) Bilamana nilai signifikansi t hitung $< t$ tabel dan H_0 ditolak, maksudnya tidak ada pengaruh signifikan antar satu variabel independen dan variabel dependen

¹ 3.6.4.2 Uji Statistik F

“Uji F digunakan sebagai pengukur ketepatan fungsi regresi untuk mengetahui nilai aktual secara statistik. Uji F berfungsi untuk mengetahui model yang digunakan cocok atau tidak” (Sugiyono, 2015). Tingkatan signifikansi di observasi ini jumlahnya 5% dan derajat kebebasan pembilang ($df_1 = k-1$) dan derajat kebebasan penyebut ($df_2 = n-k$). di observasi ini pakai karakteristik pengujian f hitung $> f$ tabel memperlihatkan bila uji model ini cocok bila dicoba di observasi (H_a diterima). Jika f hitung $< f$ tabel maka uji model ini tidak cocok bila dicoba (H_a ditolak).

3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Bagi (Ghozali, 2015) “Uji R Square (R^2) koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen”. Nilai koefisien determinasi antar 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil menampakkan kehandalan variabel independen guna menjabarkan variabel dependen kecil dan bila nilai koefisien dekat 1 jadi disebut variabel independen berpengaruh signifikan atau begitu besar pada variabel dependen.

11
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pemilihan Sampel

Objek riset yang dibubuhkan di riset ini ialah perusahaan sektor tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Populasi perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia jumlahnya 47 perusahaan. Berlandas pada golongan dengan pakai metode purposive sampling, jadi jumlah sampel yang dipakai di penelitian ini yakni jumlahnya 23 perusahaan.

31
Tabel 4.1

Teknik Pengambilan Sampel

No	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan tambang yang tercatat di BEI selama periode 2018-2020	47
2	Perusahaan sektor tambang yang tercatat di BEI dan tidak mengeluarkan data keuangan secara lengkap berlarut-larut selama periode 2018-2020	(1)
3	Perusahaan sektor tambang yang punya data lengkap sesuai dengan kebutuhan dalam observasi.	46
4	Perusahaan sector pertambangan yang mengalami kerugian selama tahun 2018-2020 berlarut-larut.	(23)
5	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	23
6	Tahun pengamatan	3
7	Jumlah laporan keuangan yang digunakan sebagai sampel	69

Tabel 4.2
Nama Perusahaan Penelitian

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	Adaro Energy Tbk.	ADRO
2	Aneka Tambang Tbk.	ANTM
3	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.	BIPI
4	Baramukti Suksessarana Tbk.	BSSR
5	Cita Mineral Investindo Tbk.	CITA
6	Darma Henwa Tbk.	DEWA
7	Elnusa Tbk.	ELSA
8	Golden Energy Mines Tbk.	GEMS
9	Harum Energy Tbk.	HRUM
10	Ifishdeco Tbk.	IFSH
11	Vale Indonesia Tbk.	INCO
12	Indo Tambang Raya Tbk.	ITMG
13	Mitrabara Adiperdana Tbk.	MBAP
14	Merdeka Copper Gold Tbk.	MDKA
15	Medco Energy International Tbk.	MEDC
16	Samindo Resources Tbk.	MYOH
17	J Resources Asia Pasifik Tbk.	PSAB
18	Bukit Asam Tbk.	PTBA
19	Petrosea Tbk.	PTRO
20	Radiant Utama Interinsco Tbk.	RUIS
21	Toba Bara Sejahtera Tbk.	TOBA
22	Ginting Jaya Energi Tbk.	WOWS
23	Kapuas Prima Coal Tbk.	ZINC

Sumber: Bursa Efek Indonesia, diakses tahun 2022

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif

Data yang dipakai di riset ini yaitu melihat pengaruh dari *political connection*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *political cost* selaku variabel bebas (*independent*) dan performa perusahaan yang ditakar

memakai *Return on Assets* (ROA) selaku variabel terikat (*dependent*). Berikut di bawah ini ialah hasil pengolahan statistik deskriptif.

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Political Connection	69	0	1	.61	.492
Political Cost	69	15.548	32.259	27.49149	4.588434
Kepemilikan Institusional	69	.000	1.000	.63959	.259266
Kepemilikan Manajerial	69	.000	.956	.07299	.199270
DA	69	.002	.290	.07674	.068869

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Berlandaskan hasil statistik deskriptif di tabel 4.3 menjelaskan data variabel yang digunakan. Penejelasan tersebut meliputi nilai minimal, nilai maksimal, rerata, dan standar deviasi berikut ini :

1. *Political Connection*

Political connection ditakar pakai menggunakan *dummy variabel*, Kode 1 guna perusahaan yang terhubung politik sedangkan 0 guna perusahaan yang tidak terbukti tidak terhubung dengan politik. Yang dimana ada 14 perusahaan yang terjalin dengan politik dan 9 perusahaan yang tidak terjalin dengan politik.

2. *Political Cost*

Political cost memiliki nilai sebesar 15,548 persen yang dipunya oleh perusahaan Elnusa Tbk. di tahun 2018. Nilai maksimal sejumlah 32,259 persen yang dipunya oleh perusahaan Adaro Enerhy Tbk. di tahun 2018. Nilai rerata dari *political cost* sejumlah 27,49 persen dan nilai standar deviasi sejumlah 4,59 persen

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0 persen yang dimiliki oleh perusahaan J Resources Asia Pasifik Tbk. yang dimana saham perusahaan tersebut tidak dimiliki oleh institusi atau badan (institusi pemerintahan, institusi luar negeri, perusahaan swasta ataupun yang lainnya). Nilai maksimum dari kepemilikan institusional sebesar 100 persen yang dimiliki oleh Ifishdeco Tbk pada tahun 2018 dan Medco Energy International Tbk pada tahun 2020. Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 63,96 persen dan nilai standar deviasi sebesar 25,93 persen

4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0 persen yang dimiliki oleh 11 perusahaan sektor pertambangan. Nilai maksimum dari kepemilikan manajerial sebesar 95,6 persen yang dimiliki oleh perusahaan J Resources Asia Pasifik Tbk. pada tahun 2018 dan 2019. Nilai rata-rata sebesar 7,3 persen dan nilai standar deviasi sebesar 19,93 persen.

5. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0,2 persen yang dimiliki oleh perusahaan J Resources Asia Pasifik Tbk. pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 29 persen yang dimiliki oleh perusahaan Mitrabara Adiperdana Tbk. pada tahun 2018. Nilai rata-rata kinerja perusahaan sebesar 7,7 persen dan nilai standar deviasi sebesar 6,9 persen.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bermanfaat guna mendapati timbulnya kemungkinan adanya bias di koefisien regresi dalam persamaan itu. Untuk mengetahui terjadi bias atau tidak, maka dilangsungkan uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

4.2.2.1 Uji Normalitas

uji normalitas yakni uji yang dilakukan buat mengukur nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai dalam uji normalitas ialah dengan uji nonparamatik Kolmogorov Smirnov (K-S). Nilai signifikan di uji Kolmogorov Smirnov dipatenkan sejumlah 0,05 menjadi ($\alpha = 0,05$ atau 5%). Bila didapat nilai signifikansi $\geq 0,05$, jadi nilai itu dimaknai kalau data itu sudah terdistribusi oleh normal dan pula bisa dimaknai kalau bisa dipakai guna sebuah riset dan begitu pulasebaliknya, jikalau didapat nilai signifikansi $\leq 0,05$, jadi nilai tersebut diartikan kalau data itu tidak terdistribusi dengan normal.

8

Tabel 4.4

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ABS_RES
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0426
	Std. Deviation	.03808
Kolmogorov-Smirnov Z		1.433
Asymp. Sig. (2-tailed)		.053

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Berlandaskan hasil normalitas di tabel itu, memperlihatkan bahwa nilai Asymp. Sig sejumlah 0,053. Hal ini memperlihatkan kalau nilai asymptotic significance $> \alpha$ (alpha) 0,05 atau $0,053 > 0,05$ jadi bisa dimaknai kalau model regresi riset ini terdistribusi secara normal.

4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilaksanakan buat mengetes apa di model regresi timbul ketidaksamaan residual antar suatu pandangan dengan pandangan yang lain. Bila varian residual dari suatu pandangan ke pandangan lain beda bisa dikatakan heteroskedastisitas, dan sebaliknya bila varian residual dari suatu pandangan ke pandangan yang lain tetap jadi dikatakan homoskedastisitas. Model regresi yang bagus ialah yang tidak timbul heteroskedastisitas. Cara uji heteroskedastisitas di riset ini memakai uji Glejser. Uji ini dilaksanakan memakai cara meregresikan nilai absolut residual (ABS_RES) selaku variabel terikat pada seluruh variabel bebas di model regresi.

28

Tabel 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Variabel	Ttabel	Thitung	α	Sig
<i>Political Connection</i>	1,99773	-1,328	0,05	0,103
<i>Political Cost</i>	1,99773	1,665	0,05	0,067
Kepemilikan Institusional	1,99773	0,627	0,05	0,051
Kepemilikan Manajerial	1,99773	1,866	0,05	0,533

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Berlandas pada hasil heteroskedastisitas di table ini, menunjukkan bila angka signifikan *Political Connection* sebesar 0,103, *Political Cost* sejumlah 0,067, Kepemilikan Institusional sejumlah 0,051, dan Kepemilikan Manajerial sejumlah

0,533. Angka tersebut berada di atas 0,05 (5%) maka data tersebut menunjukkan tidak timbul **heterokedastisitas**.

4.2.2.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilaksanakan guna mendapati hubungan antara variabel bebas. Uji ini dilakukan bermanfaat guna mengetes apa ada jalinan **antar variabel independen** di **model regresi**. Ada **tidak** multikolinieritas dapat diamati dari besarnya **Tolerance** dan **Variance Inflation Factor (VIF)**. Bila nilai **Tolerance > 0,1** dan nilai **VIF < 10**, jadi bisa diambil kesimpulan kalau model regresi itu tidak mengalami masalah multikolinieritas.

12

Tabel 4.6

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Tolerance	Kesimpulan
<i>Political Connection</i>	1,164	0,859	Tidak terjadi Multikolinieritas
<i>Political Cost</i>	1,055	0,948	
Kepemilikan Instiusional	1,778	0,562	
Kepemilikan Manajerial	1,965	0,509	

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Berlandaskan **tabel** diatas **hasil uji** multiokolinieritas memperlihatkan **nilai** seluruh variabel bebas, dengan nilai **VIF dibawah 10** dan nilai **tolerance** dibawah **0,1**. Jadi bisa dimaknai kalau **model regresi** itu tidak mengalami masalah multikolinieritas.

41

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilangsungkan bermanfaat guna mengetes apa ada atau tidak korelasi pada masalah yang terjadi saat periode t dengan masalah yang

terjadi saat periode t-1 di model regresi linear. Guna mengetes apakah ada atau tidak autokorelasi dapat memakai uji Durbin-Watson (DW).

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
80	.554 ^a	.307	.263	.059115	1.587

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Berlandaskan hasil penilaian autokorelasi memakai method Durbin-Watson memperlihatkan hasil nilai Durbin-Watson sejumlah 1,587. Angka Durbin-Watson berada antara -2 hingga +2 yang bermakna tidak ada autokorelasi di riset ini.

4.2.3 Hasil Regresi Linier Berganda

Guna menemui ada atau tidak pengaruh antar variabel bebas yang berisi dari *Political Connection* (X_1), *Political Cost* (X_2), Kepemilikan Institusional (X_3), dan Kepemilikan Manajerial (X_4) pada variabel terikat yang pada hal ini adalah Kinerja Perusahaan (Y)

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	t	Sig
	B	Std.Error	Beta		
Constant	0.001	0.053		0.014	0.989
Political Connection	0.041	0.016	0.294	2.614	0.011
Political Cost	-4.325E-005	0.002	-0.003	-0.027	0.979
Kepemilikan Institusional	0.153	0.037	0.575	4.140	0.000
Kepemilikan Manajerial	0.031	0.050	0.089	0.608	0.545
R Square				0.307	
F hitung				7.073	
Sig. F				0.000	
Variable Terikat: Kinerja Perusahaan					

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.12, lalu dapat diketahui model persamaan regresi

linier berganda dan hasil analisis yang diperoleh berikut ini :

$$ROA = 0,001 + 0,041 X_1 - 4.325E-005 X_2 + 0,153 X_3 + 0,031 X_4 + e$$

Dari hasil analisis regresi linier berganda diatas bisa dijabarkan berikut ini

:

1. Nilai konstanta sejumlah 0,001. Konstanta bernilai positif bisa dimaknai jikalau semua variabel bebas yaitu *political connection*, *political cost*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial bernilai nol atau tetap, maka kinerja perusahaan memiliki nilai 0,001. Hal ini juga dapat dikatakan apabila *political connection*, *political cost*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial dalam kondisi tetap maka masih ada kinerja perusahaan.
2. Koefisien regresi variabel *political connection* punya nilai sejumlah 0,041. Koefisien nilainya positif, hingga bisa disebut *political connection* dan

kinerja perusahaan punya jalinan yang searah. maknanya, bila variabel *political cost*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial bernilai konstan atau tetap dan *political connection* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0,041. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa semakin banyak *political connection* yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin meningkat pula kinerja perusahaan.

3. Koefisien regresi variabel *political cost* memiliki nilai sejumlah $-4.325E-005$. Koefisien bernilai negatif, sehingga sehingga dapat dikatakan *political cost* dan kinerja perusahaan memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Artinya, jika variabel *political connection*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial bernilai konstan atau tetap dan *political cost* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kinerja perusahaan akan mengalami penurunan sebesar $4.325E-005$. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa semakin banyak biaya politik yang dikeluarkan oleh perusahaan maka kinerja perusahaan akan mengalami penurunan.
4. Koefisien regresi variabel kepemilikan institusional punya nilai besarnya 0,153. Koefisien bernilai positif, sehingga sehingga dapat dikatakan kepemilikan institusional dan kinerja perusahaan memiliki hubungan yang searah. Artinya, jika variabel *political connection*, *political cost*, dan kepemilikan manajerial bernilai konstan atau tetap dan kepemilikan institusional mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0,153. Hal ini juga dapat dikatakan

kalau makin banyak saham yang dipunya oleh pihak institusi jadi bisa meninggikan kinerja perusahaan.

5. Koefisien regresi variabel kepemilikan manajerial punya nilai sejumlah 0,031. Koefisien nilainya positif, hingga sehingga bisa disebut kepemilikan institusional dan kinerja perusahaan punya jalinan yang searah. Maksudnya, bila variabel *political connection*, *political cost*, dan kepemilikan institusional nilainya konstan atau tetap dan kepemilikan manajerial terjadi peningkatan sejumlah 1 satuan, jadinya kinerja perusahaan akan terjadi peningkatan besarnya 0,031. Hal ini pula dapat disebut kalau makin banyak saham yang dipunya oleh pihak manajer maka bisa meninggikan kinerja perusahaan.

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

4.2.4.1 Hasil Uji t

Uji statistik t menampakkan betapa jauh pengaruh variabel independen dengan cara parsial pada variabel dependen. Pengaruh sangat mendominasi atau tiap-tiap variabel independen guna menjabarkan variabel dependen pakai tingkat signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$) bisa ditetapkan pakai uji statistik t. pemungutan ketetapan dilangsungkan berlandas pada perbandingan nilai t hitung tiap-tiap koefisien regresi pada tabel selaras pada tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan penyebut ($df = n-k$, dikala k yakni jumlah variabel bebas.

Tabel 4.9
Hasil Uji t

Variabel	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig.	α	Keputusan
<i>Political Connection</i>	2.614	1,99773	0.011	0.05	Signifikan
<i>Political Cost</i>	0.027	1,99773	0.979	0.05	Tidak Signifikan
Kepemilikan Institusional	4.140	1,99773	0.000	0.05	Signifikan
Kepemilikan Manajerial	0.608	1,99773	0.545	0.05	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Berlandaskan hasil pengtesan uji t di tabel 4.9 didapat t_{tabel} sejumlah 1,99773 ($df = n-k = 69-4 = 65$), jadi dari penghitungan itu bisa diuraikan berikut ini:

1. Berlandaskan tabel itu (Tabel 4.9) nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ialah $2,614 > 1,99773$ pakai taraf signifikansi $0,011 < 0,05$. Lalu, boleh dicomot rangkuman bila H_0 ditolak dan H_a diterima yang maksudnya bila *Political Connection* berpengaruh signifikan di Kinerja Perusahaan, hingga hipotesis pertama yang menyebutkan kalau: *Political connection* berpengaruh pada kinerja perusahaan dapat dibuktikan kebenarannya.
2. Berlandaskan tabel itu (Tabel 4.9) nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ialah $0,027 > 1,99773$ pakai taraf signifikansi $0,979 < 0,05$. lalu, bisa dicomot kesimpulan bila H_0 diterima dan H_a ditolak yang bermaksud kalau *Political Cost* tidak berpengaruh pada Kinerja Perusahaan, sehingga hipotesis kedua yang mengatakan kalau: *Political cost* berpengaruh pada kinerja perusahaan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
3. Berlandaskan tabel itu (Tabel 4.9) nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ialah $4,140 > 1,99773$ dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bila Kepemilikan institusional berpengaruh di Kinerja Perusahaan, hingga hipotesis ketiga

yang mengatakan kalau: Kepemilikan institusional berpengaruh pada kinerja perusahaan bisa dibuktikan kebenarannya.

4. Berlandaskan tabel itu (Tabel 4.9) nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ialah $0,608 > 1,99773$ pakai taraf signifikansi $0,545 < 0,05$. Lalu, bisa dicomot kesimpulan kalau **Ho diterima dan Ha ditolak** yang bermaksud bisa **Kepemilikan Manajerial tidak** ada pengaruh ke Kinerja Perusahaan, hingga hipotesis ke empat yang mengatakan bila : Kepemilikan manajerial berpengaruh pada kinerja perusahaan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

4.2.4.2 Hasil Uji F

Uji F dipakai selaku alat ukur kecocokan fungsi regresi guna mendapati nilai aktual dengan cara statistik. Uji F bermanfaat guna mendapati model yang dipakai layak atau tidak. Tingkat signifikan di observasi ini jumlahnya 5% dengan derajat kebebasan pembilang ($df1$) = $k-1$ dan derajat kebebasan penyebut ($df2$) = $n-k$. Di observasi ini pakai karakteristik pengtesan $f_{hitung} > f_{tabel}$ memperlihatkan bila uji model ini cocok dicomot di observasi (Ha diterima). Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ lalu uji model ini tidak cocok buat dipakai (Ha ditolak).

Tabel 4.10

Hasil Uji F

Fhitung	Ftabel	Sig	α	Kesimpulan
7.073	2.51	0.000	0.05	Layak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Berlandaskan tabel 4.13 hasil uji f menandakan jikalau nilai f_{hitung} besarnya 7,073 sedang nilai f_{tabel} ialah besarnya 2,51 ($df1 = 4$ dan $df2 = 69-4 = 95$) dan nilai signifikan uji f jumlahnya 0,000 dengan nilai α (alpha) sebesar 0,05. Hal ini memperlihatkan hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $7,073 > 2,51$ dan signifikansi uji $F < \alpha$

(alpha) atau $0,000 < 0,05$, lalu bisa diartikan jikalau uji model ini cocok guna dipakai di riset ini.

4.2.4.3 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bermanfaat guna menakar berapa jauh kecakapan model buat menjelaskan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi antar 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil memperlihatkan bila variabel independen guna menguraikan variabel dependen kecil dan jika nilai koefisien dekat 1 maka dikatakan variabel independen berpengaruh signifikan atau begitu besar ke variabel dependen.

Tabel 4.11

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.554 ^a	.307	.263	.059115

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Dari tabel 4.10 diperoleh nilai R Square sebesar 0,307 yang artinya pengaruh variabel bebas ialah *Political Connection* (X_1), *Political Cost* (X_2), Kepemilikan Institusional (X_3), dan Kepemilikan Manajerial (X_4) pada variabel terikat yang pada hal ini ialah Kinerja Perusahaan (Y) yakni sebesar 30,7% sedang sisanya besarnya 69,3% di pengaruhi oleh variabel lain di luar observasi ini.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Riset ini bermanfaat buat dapat pengaruh variabel independent ialah *Political Connection* (X₁), *Political Cost* (X₂), Kepemilikan Institusional (X₃), dan Kepemilikan Manajerial (X₄) pada variabel dependent ialah Kinerja Perusahaan (Y). Pada hasil analisis data, jadi bisa dijabarkan berikut ini :

4.3.1 Pengaruh *Political Connection* terhadap Kinerja Perusahaan

Berlandaskan hasil analisis didapati kalau *Political Connection* berpengaruh pada Kinerja Perusahaan. Perusahaan yang terhubung secara politik akan mendapatkan beragam profit antaranya seperti akses mudah guna pembayaran pinjaman bank, menerima kontrak dari pemerintah, serta perihal administrative yang dipermudah. Dengan keuntungan tersebut tentunya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini perusahaan yang ditelaah merupakan perusahaan yang bergerak di sektot pertambangan yang tentunya perlu adanya syarat-syarat adminstratif yang harus dipenuhi, dengan memiliki koneksi politik tentunya perusahaan bisa jauh sangat mudah dan lebih cepat guna memnuhi syarat-syarat administratif tersebut.

Riset ini searah dengan observasi yang dilangsungka oleh (Wulandari & Raharja 2013) yang mengatakan kalau “*political connection* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan”

4.3.2 Pengaruh *Political Cost* terhadap Kinerja Perusahaan

Berlandaskan hasil observasi didapati kalau *Political Cost* tidak berpengaruh pada Kinerja Perusahaan. *Political cost* termasuk seluruh biaya (transfer aset) yang wajib dibebankan pada perusahaan terpaut pakai perbuatan-

perbuatan politis misal pajak, regulasi, subsidi pemerintah, tarif, antitrust, desakan buruh dan lainnya. Perusahaan yang banyak terkandung *political cost* maka condong melaksanakan manajemen laba guna meminimalkan *political cost* dan akhirnya bisa meminimalkan laba dan kinerja perusahaan. Bila perusahaan besar punya laba yang besar secara relatif awet, jadi pemerintah bisa terdorong guna meninggikan pajak dan meminta pelayanan publik yang lebih besar pada perusahaan.

Observasi ini searah dengan observasi yang dilaksanakan oleh (Dewata, dkk 2018) yang menyatakan kalau “*political cost* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan”.

4.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan

Berlandas pada hasil analisis didapati kalau Kepemilikan Institusional berpengaruh pada Kinerja Perusahaan. Investor institusional punya kelebihan yang lebih dibanding dengan investor perorangan, khususnya pemilik saham institusi mayoritas atau di atas 5. Makin tinggi kepemilikan institusional jadi makin besar kontrol luar pada perusahaan dan meminimalkan *agency cost*. Dengan ada kontrol luar yang besar jadi manajemen berhati – hati guna memungut ketetapan.

Penelitian ini sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh (Nur’ aeni 2010) Hasil dari riset ini menampakkan kalau “kepemilikan institusional dalam perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan”.

4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan

Berlandas pada hasil telaah dapat didapati kalau Kepemilikan Manajerial tidak ada pengaruh pada Kinerja Perusahaan. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial di perusahaan sector pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia masih tergolong sangat rendah, hanya sedikit perusahaan yang struktur manajemennya memiliki saham di perusahaan yang mereka pimpin. Tercatat hanya ada 6 perusahaan yang struktur manajemennya memiliki saham diatas 5% di perusahaan yang mereka pimpin, sedangkan 17 perusahaan yang lainnya dibawah 5% bahkan ada yang 0%.

Observasi ini searah dengan observasi ini dilangsungkan oleh (Nur'aei 2010) Hasil dari riset ini menandakan kalau "kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan".

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

5.1 Simpulan

Observasi ini diartikan untuk mengkaji Pengaruh *Political Cost*, *Political Connection*, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial pada Kinerja Perusahaan ke Perusahaan Pertambangan tahun 2018-2020. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilaksanakan di observasi ini jadi bisa diambil kesimpulan berikut ini :

1. Variabel Political Connection berpengaruh pada Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan tahun 2018-2020.
2. Variabel Political Cost tidak ada pengaruh pada Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan tambang tahun 2018-2020.
3. Variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh pada Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan tambang tahun 2018-2020.
4. Variabel Kepemilikan Manajerial tidak ada pengaruh pada Kinerja Perusahaan kepada Perusahaan Pertambangan tahun 2018-2020

5.2 Saran

Berlandaskan kesimpulan itu, bisa dikatakan berapagm saran yang didambakan bisa berguna bagi perusahaan ataupun bagi pihak-pihak lainnya.

Adapula saran yang diberi, diantaranya :

1. Riset ini fokusnya di koneksi politik, biaya politik, struktur kepunyaan pada performa perusahaan yang ada didalam perusahaan

pertambahan, didambakan guna periset berikutnya bisa menumbuhkan dan meriset faktor lain yang bisa memengaruhi kinerja perusahaan.

2. Perusahaan baiknya lebih memerhatikan kinerja perusahaan yang bagus tanpa mengutamakan dan mengendalikan koneksi politik dengan cara mempertahankan kondisi manajemen perusahaan secara profesional dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan sehingga tidak memiliki risiko yang lebih tinggi. Selain itu keterbukaan dan kemudahan akses publik terhadap informasi tokoh dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan dapat membantu mengurangi reaksi irasional dari berita yang terkait dengan dugaan praktek politik negatif, yang akan berdampak pada operasional perusahaan.

73

5.3 Keterbatasan Penelitian

Di riset ini ada keterbatasan yang bisa menjadi patokan pertimbangan guna periset seterusnya. Keterbatasan riset itu ialah pemakaian sampel yang cuma asalnya dari Sektor tambang yang tercatat di BEI kurun waktu 2018-2020. Oleh sebab itu, periset berikutnya didambakan melaksanakan riset dengan kurun waktu yang sangat panjang guna mendapat hasil yang lebih tepat. Riset ini punya keterbatasan disaat koefisien determinasi yang masih relatif minim. Hal ini bisa timbul sebab masih ada variabel lain yang pengaruh signifikan, tapi tidak diikutkan pada riset ini hingga guna riset berikutnya bisa ditumbuhkan dengan menambah variabel-variabel lain yang memengaruhi performa perusahaan. Dan juga itu riset ini punya keterbatasan diantaranya performa perusahaan Cuma

ditakar lewatrasio ROA disaat rasio ROA condong fokus di ⁵ tujuan jangka pendek bukan jangka panjang, selain itu riset ini cuma mengamati political connection dari jalinan langsung pakai cara mengklarifikasi jajaran dewan direksi dan dewan komisaris dengan tidak mengikutsertakan sampel perusahaan yang punya political connection dari jalinan tidak langsung misal jalinan persahabatan.

REFERENCES

- Abdul Azis dan Dr. Ulil Hartono. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Modal, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Surabaya*.
- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. 2006. Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25, 574–595.
- Ahmad, Chariri dan Imam Ghozali. 2007. “Teori Akuntansi”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ang, Robert. 1997. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*. Penerbit Mediasoft Indonesia, Jakarta.
- Anggraini, Novita dan Ceacilia, Srimindarti. 2009. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional dan Kebijakan Hutang Terhadap Kepemilikan Manajerial. *Kajian Akuntansi*. Vol. 1, Agustus 2009, pp. 133-152.
- Anthony, Robert N, dan Vijay Govindarajan. 2012. *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aprianto, Rachmat dan Dista Amalia Arifah. 2014. Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Deviden dan Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2010). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 15. Nomor 1. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Astria, Tia. 2011. Analisis Pengaruh Audit Tenure, Struktur Corporate Governance, Dan Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *SKRIPSI*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Barnae, A. dan Rubin, 2005. Corporate Social Responsibility as a Conflict Between Shareholders. *Journal of Business Ethics*. 97 (1):71 – 86
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2007. *Accounting Theory (Terjemahan)*. Jakarta: Salemba Empat
- Boubakri, N., dkk (2008). *Political Connections of new privatized firms*. *Journal of Corporate Finance*.
- Calvin, Oktomegah. (2012). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme pada Perusahaan manufaktur di BEI”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Vol. 1 No. 1, Januari 2012.
- Chaney, P., et. al., 2011, The Quality of Accounting Information In Politically Connected Firms, *Journal of Accounting and Economics*, Vol.51, No. 1-2, p. 58-76.
- Chantrataragul, Dusadee. 2007. “Political Connection and Ownership Concentration: Evidence From Thailand.” Tesis. Program Master Sains Keuangan., Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universitas Thammasat Thailand.
- Dessy, Indriastiti P.P. 2008. “Hubungan Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Perusahaan”. Skripsi. Fakultas Ekonomi. UNDIP: Semarang.

- Dewata, Deva, dkk. 2018. Pengaruh Biaya Lingkungan, Kepemilikan Asing Dan *Political cost* Terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Politeknik Negeri Sriwijaya Madiun. Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi). Vol. 3, No.2, Hal. 122-123.
- Dewi, Astuti. 2008. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Faccio, Mara, 2006, Politically Connected Firms, Journal American Economic Assosiation, Vol. 96, No. 1, pp: 369-386.
- Faisal. 2005. Analisis Agency Cost, Struktur kepemilikan, dan Mekanisme Corporate Governance. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 8 No. 2. 175-290.
- Fatimah, Nur, & Susanti. 2018. Pengaruh Pembelajaran Akuntansi Keuangan, Literasi Keuangan, dan Pendapatan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik. Jurnal Pendidikan Akuntansi. Vol. 6 No. 1.
- Ghozali, I. 2015. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Vol. VII. Semarang: Undip.
- Goldman, et al (2009). Do politically connected boards affect firm value. Review of Financial Studies. 22(6),2331-2360.
- Hakim, Abdul. 2006. Analisis Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasi Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah. JRBI. Vol 2. No 2. Hal: 165- 180.
- Haruman, Tendi. 2007. Pengaruh Keputusan Keuangan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan. PPM National Conference on Management Research Manajemen di Era Globalisasi. Hal 1-20. Bandung.
- Horne V. James dan John M Wachowicz. 2005. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Fundamental of Financial Management). Edisi 12. Diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari. Jakarta: Salemba Empat.
- Husein, Umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I, Jatiningrum C dan Rofiqoh. 2004. Struktur Kepemilikan dan Manajemen Laba. Simposium Dwi Tahunan the Center for Accounting adn Management Development (Universitas Teknologi Yogyakarta).
- Indriastiti, Dessy P.P. 2008. "Hubungan Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Perusahaan". Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UNDIP: Semarang.
- Jama'an. 2008. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Publik Di BEJ).Tesis Strata-2.Program Studi Magister Sains Akuntansi.Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kasiram, Moh. 2008. Metodologi Penelitian. Malang: UIN-Malang Pers.
- Khamis, R. (2015). The Relationship between Ownership Structure Dimensions and Corporate Performance: Evidence from Bahrain. Business and Finance, 9(4), 38-56.

- Makaombohe, Y.Y, et al. 2014. "Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen laba pada Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011". Jurnal EMBA Vol. 2 No. 1.
- M. B. Herman, And A. Purwanto. 2014. Pengaruh Manajemen Laba, Risiko Pasar, Komite Audit, Audit Eksternal, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Pasar (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 0, Pp. 110-121.
- Mobarak, A. M., dan Purbasari, D. 2005. *Political Trade Protection in Developing Countries: Firm Level Evidence from Indonesia*. University of Colorado at Boulder.
- Nur'aeni, Dini. 2010. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Oberholzer-Gee. 2006. Political Relationship, Global Financing, and Corporate Transparency: Evidence from Indonesia. *Journal of Financial Economics*. 81 (2): 411-439.
- Permanasari, Wien Ika. 2010. Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Purwoto, Lukas. 2011. Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham. Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen. Universitas Gadjah Mada.
- Sabrina, Anindhita Ira. 2010. "Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan". Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sari, Nadya Winda et.al. 2016. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom*.
- Sartono, Agus. 2011. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Sarwinda, Prilly dan Afriyenti Mayar. 2015. Pengaruh Cash Holding, Political Cost, dan Nilai Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. Vol 3 No.1.
- Shien, et.al. 2006 *Financial Accounting Theory* 3th editon. Pearson Prentice Hall.
- Shleifer, A dan R.W. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*, Vol. 52. No. 2 Juni. 737-783.
- Sholekah, F.W., & Venusita, L. (2014). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage, Firm Size Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan High Profile Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 2 No 3.
- Singgih, Santoso (2009). *Panduan lengkap Menguasai Statistik Dengan SPSS 17*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Siregar, Sylvia Veronica N.P. & Siddharta Utama. 2006. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.9, No.3, h.307-326.69
- Solihah, R. (2016). Pola relasi bisnis dan politik di Indonesia masa reformasi: Kasus rent seeking. Departemen Ilmu Politik FISIP. Universitas Padjadjaran. *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 1 No.1, Hal. 41-52.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, Patrick A. dan Sany, 2015, Pengaruh Political Connection Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Terhadap Return On Equity dan Asset Turnover Perusahaan di Sektor Konstruksi, *Journal of Business Accounting Review*, Vol. 3, No. 2, pp.261-270.
- Sujoko dan Ugy Soebiantoro. 2007. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage, Faktor Interen dan Faktor Eksteren terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Universitas 17 Agustus Surabaya. Vol 9, No. 1.
- Sukirni, Dwi. 2012. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen Dan Kebijakan Hutang Analisis Terhadap Nilai Perusahaan (studi tentang perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010). *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765.
- Wahyudi, U., dan H.P. Pawestri. 2006. Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. Makalah Disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Wicaksono, A. P. 2017. Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak : Fenomena di Indonesia Akuntabilitas: *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10 No 1, 167 - 180 .
- Wijayanti. 2006. Analisis Pengaruh Perbedaan Antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba, Akrua, dan Kas. Makalah Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang. Hal. 1-31.
- Wijantini. 2007. A Test of The Relationship Between Political Connection and Indirect Costs of Financial Distress In Indonesia. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, Vol. 3, No. 2, h.61-81.
- Winanda, Asita Putri. 2009. Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Wulandari, Tri dan Raharja. 2013. Analisis Pengaruh *Political connection* dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 1, P. 1-12.
- Wulandari, Laela. 2018. Pengaruh Political Connection Pada Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2010-2014.

- Jurnal. Jurusan Manajemen. Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Universitas Surabaya. Vol. 7, No. 1, Hal. 1196-1226.
- Tehupuring, Ronald dan Ellia Rossa. 2016. Pengaruh Koneksi Politik Dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Di Lembaga Perbankan Yang Terdaftar Di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei.
- Yusuf, Haryono. 2005. Dasar – Dasar Akuntansi. Yogyakarta: Akademi Akuntansi YKPN.

<https://koran.tempo.co/> diakses pada tanggal 2 November 2021

<https://jdih.ppatk.go.id/> diakses pada tanggal 21 November 2021

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Student Paper	5%
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	3%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
5	core.ac.uk Internet Source	1%
6	repository.usd.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1%
8	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%
9	repository.iaincurup.ac.id	

Internet Source

1 %

10

ejournal-s1.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

11

adoc.pub

Internet Source

<1 %

12

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

13

repository.stei.ac.id

Internet Source

<1 %

14

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

15

repository.unj.ac.id

Internet Source

<1 %

16

123dok.com

Internet Source

<1 %

17

[Submitted to Universitas Merdeka Malang](#)

Student Paper

<1 %

18

journal.pnm.ac.id

Internet Source

<1 %

19

lib.ibs.ac.id

Internet Source

<1 %

20

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

21	erepository.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
23	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
25	ejournal.unp.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
27	Elisa Putri Agustin, Jacobus Widiatmoko. "Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba", Owner, 2022 Publication	<1 %
28	eprints.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
29	idoc.pub Internet Source	<1 %
30	Siti Salmah. "PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR	<1 %

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)", INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI, 2018

Publication

31 Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang <1 %
Student Paper

32 id.123dok.com <1 %
Internet Source

33 repository.uin-suska.ac.id <1 %
Internet Source

34 Submitted to Universitas Muria Kudus <1 %
Student Paper

35 docslide.us <1 %
Internet Source

36 repository.trisakti.ac.id <1 %
Internet Source

37 e-journal.unmas.ac.id <1 %
Internet Source

38 1library.net <1 %
Internet Source

39 pt.scribd.com <1 %
Internet Source

40 repositori.usu.ac.id <1 %
Internet Source

text-id.123dok.com

41

Internet Source

<1 %

42

Nisa Apriani, Trisandi Eka Putri, Indah Umiyati. "THE EFFECT OF TAX AVOIDATION, EXCHANGE RATE, PROFITABILITY, LEVERAGE, TUNNELING INCENTIVE AND INTANGIBLE ASSETS ON THE DECISION TO TRANSFER PRICING", JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society), 2021

Publication

<1 %

43

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

44

Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

<1 %

45

repository.stie-yai.ac.id

Internet Source

<1 %

46

wisuda.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

47

Nabila Khoirunnisa Asadanie, Lintang Venusita. "Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak", INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI, 2020

Publication

<1 %

48

Submitted to STIE Perbanas Surabaya

Student Paper

<1 %

49	snaper-ebis.feb.unej.ac.id Internet Source	<1 %
50	www.repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
51	Evan Hamzah Muchtar, Herni Purwatiningsih. "ANALISA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA EMITEN SAHAM SYARIAH", Al-Amwal, 2021 Publication	<1 %
52	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
53	ejournals.umn.ac.id Internet Source	<1 %
54	es.scribd.com Internet Source	<1 %
55	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %
56	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
57	repository.pelitabangsa.ac.id:8080 Internet Source	<1 %
58	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %

59	repository.univ-tridinanti.ac.id Internet Source	<1 %
60	Nita Andriyani Budiman. "PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2019 Publication	<1 %
61	eprints.mdp.ac.id Internet Source	<1 %
62	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1 %
63	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
64	media.neliti.com Internet Source	<1 %
65	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
66	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
67	Amirah Ahmad Nahrawi. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI	<1 %

Syariah", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2017

Publication

68	abecindonesia.org Internet Source	<1 %
69	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
70	dumadia.wordpress.com Internet Source	<1 %
71	ejournal.stebisigm.ac.id Internet Source	<1 %
72	ekonomi.usni.ac.id Internet Source	<1 %
73	repo.pelitabangsa.ac.id Internet Source	<1 %
74	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
75	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
76	www.scribd.com Internet Source	<1 %
77	DIANA SARI. "19 PENGARUH BOOK VALUE, DEBT TO EQUITY RATIO, DEBT TO ASSET RATIO, RETURN ON ASSET TERHADAP HARGA SAHAM PADA SEKTOR PERTAMBANGAN	<1 %

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2013.", MANAJERIAL, 2018

Publication

78

Evada Dewata, Hadi Jauhari, Yuliana Sari, Eka Jumarni. "PENGARUH BIAYA LINGKUNGAN, KEPEMILIKAN ASING DAN POLITICAL COST TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA", Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi), 2018

Publication

<1 %

79

Maria Suryaningsih, Mulia Ningsih. "DETERMINAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (CSR) PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN PERIODE 2014-2018", JURNAL AKUNTANSI, 2021

Publication

<1 %

80

Muhammad Yusuf, Andika Kurniawan. "Pengaruh Non-Debt Tax Shield Dan Cost Of Financial Distress Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017", Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan, 2020

Publication

<1 %

81

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

82

Ahmad Maulana, Lela Nurlela Wati. "PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN

<1 %

STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN", JURNAL AKUNTANSI, 2020

Publication

83

Silvia Dela Agusta, Siti Nurlaela, Purnama Siddi. "Pengaruh Kepemilikan Mangerial , Debt To Equity Ratio, Kepemilikan Institusioanal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan", Owner, 2022

Publication

<1 %

84

ojs.unimal.ac.id

Internet Source

<1 %

85

repository.pelitabangsa.ac.id

Internet Source

<1 %

86

Supriatiningsih Supriatiningsih, Veronica Melinda Astrinigsih. "SISTEM E-FILLING: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI STUDI KASUS PADA PT. POLAPULPINDO MANTAP", JURNAL AKUNTANSI, 2020

Publication

<1 %

87

repository.umsu.ac.id

Internet Source

<1 %

88

Ahmad Zakie Mubarrok, Almer Reyhan Islam. "THE EFFECT OF MANAGEMENT CHANGE, AUDIT OPINION, COMPANY SIZE, FINANCIAL DISTRESS AND AUDITOR REPUTATION ON AUDITOR SWITCHING", ACCRUALS

<1 %

(Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 2020

Publication

89

qdoc.tips
Internet Source

<1 %

90

repository.radenintan.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On